

QUICK WINS MASTERPLAN PENGEMBANGAN**KAWASAN PULAU SUMBA**

Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur memiliki 4 kabupaten, yakni Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah. Keempat kabupaten tersebut memiliki industri pertanian, peternakan, dan pariwisata yang bisa dikembangkan. Di sisi lain, *major project food estate*, pengembangan kawasan wisata taman nasional, dan proyek strategis lainnya akan dilakukan di Pulau Sumba. Hal ini dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten dan Pulau Sumba secara keseluruhan.¹ Di saat yang sama, Bappenas menginisiasi adanya pembuatan *masterplan* pengembangan Pulau Sumba dan kawasan-kawasan di sekitarnya.²

Keempat kabupaten tersebut memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi sebesar 20,9% per September 2020.³ Di sisi lain, keempatnya memiliki nilai TPT yang lebih baik dari nilai provinsi sebesar 4,28% per September 2020.⁴ Tingkat kemiskinan dan TPT tersebut juga dipengaruhi oleh nilai IPM Pulau Sumba. Dari keempat kabupaten tersebut, hanya Kab. Sumba Timur yang memiliki nilai IPM sedikit lebih baik dari nilai IPM provinsi.⁵ Nilai IPM tersebut mengindikasikan tingkat kualitas sumber daya manusia masih memerlukan peningkatan. Hal

tersebut mengakibatkan kualitas pekerjaan masyarakat memiliki nilai tambah rendah sehingga belum dapat mengangkat mereka ke atas garis kemiskinan.

Kondisi beberapa infrastruktur dasar Pulau Sumba juga berada di bawah rata-rata nasional.⁶ Hal ini turut mencakup beberapa infrastruktur penting pendukung *masterplan* Pulau Sumba. Infrastruktur telekomunikasi di keempat kabupaten berada di bawah nilai rata-rata nasional sebesar 66,22. Hal yang sama juga terjadi pada infrastruktur sanitasi sebesar 87. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan keempat kabupaten tersebut juga berada di bawah rata-rata nasional sebesar 55,56 dan 45,93. Jika nilai rata-rata nasional untuk kedua variabel tersebut masih rendah maka nilai rata-rata Pulau Sumba lebih rendah lagi. Selain itu, nilai infrastruktur transportasi jalan raya untuk Kab. Sumba Tengah dan Barat Daya lebih rendah dari rata-rata nasional, sekalipun Kab. Sumba Barat dan Timur telah lebih baik. Dengan kondisi tersebut, keberadaan *masterplan* pengembangan Pulau Sumba diharapkan menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat Sumba.

¹ LPE Kab. Sumba Barat, Barat Daya, Tengah, dan Timur sebesar -1,71%, -1,67%, -0,53%, dan -1,97%. Bahan Laporan Kunjungan Kementerian PPN/Bappenas ke Pulau Sumba 3-6 Juni 2021.

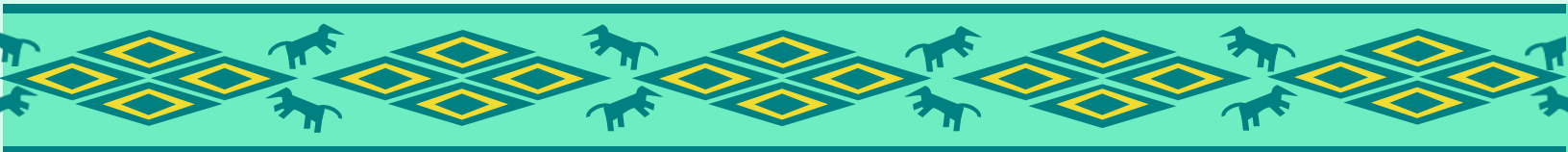
² Arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas saat kunjungan Kementerian PPN/Bappenas di Kantor Bupati Sumba, 5 Juni 2021.

³ Tingkat kemiskinan Kab. Sumba Barat, Barat Daya, Tengah, dan Timur sebesar 28,17%, 28%, 34,49%, dan 29,65% (BPS Nusa Tenggara Timur, 2020).

⁴ TPT Kab. Sumba Barat, Barat Daya, Tengah, dan Timur sebesar 3,96%, 2,36%, 4,02%, dan 3,49%. Bahan Laporan Kunjungan Kementerian PPN/Bappenas ke Pulau Sumba 3-6 Juni 2021.

⁵ Bahan Laporan Kunjungan Kementerian PPN/Bappenas ke Pulau Sumba 3-6 Juni 2021.

⁶ Paparan Infrastruktur Sosial Dasar Prov. NTT, Direktorat Regional 3, Kedeputusan Regional dan Pengembangan Wilayah, Kementerian PPN/Bappenas.



Pengembangan *masterplan* tersebut memerlukan beberapa hal. Pertama, Pemerintah perlu mengembangkan lembaga vokasional terstandarisasi (berbasis sekolah dan lembaga pelatihan) sesuai dengan industri potensial di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya *oversupply* tenaga kerja di satu industri tertentu, seperti pariwisata dan *hospitality*. Di saat yang sama, setiap industri akan mendapat tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain itu, pengembangan *food estate* akan meningkatkan industri pertanian di daerah Sumba sehingga membutuhkan tenaga kerja terampil yang lebih banyak. Kedua, Pemerintah perlu mengintegrasikan industri yang ada dengan lembaga vokasional tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari *link and match* tenaga kerja dengan lapangan usaha. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan kemungkinan yang lebih besar untuk langsung bekerja. Di sisi lain, kedua rekomendasi ini juga dapat menjadi *exit policy* bagi masyarakat yang terdampak oleh pandemi dan berencana untuk bekerja kembali saat pandemi mulai berakhir. Kombinasi kedua rekomendasi ini diharapkan dapat memperbaiki nilai IPM Pulau Sumba secara umum.

Ketiga, Pemerintah perlu mengintegrasikan industri di Pulau Sumba. Industri *hospitality* Pulau Sumba dapat memanfaatkan hasil pertanian dan peternakan yang didapatkan dari kawasan *food estate* dan wilayah-wilayah lainnya. Hal ini akan menguatkan ekonomi masyarakat karena memiliki jaringan distribusi hulu-hilir yang pasti. Keempat, Pemerintah dapat membagi kawasan wisata terstandarisasi sesuai dengan target pasar yang dituju dan eksklusivitas yang dapat diberikan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan potensial yang didapatkan dari sektor pariwisata sekaligus tidak

⁷ Pemerintah dapat menggunakan konsep *price discrimination* untuk masing-masing kawasan wisata. Dengan demikian, Pemerintah perlu menentukan kawasan wisata yang akan dijadikan kawasan

mengurangi jumlah wisatawan yang datang.⁷ Selain itu, masyarakat dari berbagai tingkat pendapatan dapat menikmati kawasan wisata sesuai standar dan tingkat pendapatan yang mereka miliki.

Terakhir, Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar dan penunjang yang terintegrasi dalam kawasan *masterplan* Pulau Sumba. Hal ini dapat diwujudkan dengan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan swasta. Di antara infrastruktur yang perlu diadakan adalah infrastruktur jalan, telekomunikasi, dan kelistrikan. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi hingga tahap *last mile* akan dibutuhkan, terutama pada kawasan-kawasan pariwisata. Selain itu, pengembangan infrastruktur kelistrikan juga sangat diperlukan agar rasio elektrifikasi di Provinsi NTT yang tergolong cukup kecil dapat ditingkatkan.⁸ Kondisi ini juga dapat menjadi momen akselerasi pengembangan EBT di Pulau Sumba dan NTT secara umum.

Integrasi kelima rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba. Pada akhirnya, kolaborasi antara masyarakat, NGO, dan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah sangat dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Mohon untuk mengisi kuesioner tanggapan atas kajian di atas dengan mengklik tautan berikut:
<https://bit.ly/KuesionerKunkerSumba>

Penulis: Jabbar Hidayatullah, S.E.
Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Email: jabbar.hidayat@bappenas.go.id

premium secara tepat dan tidak mewujudkannya di setiap kawasan.

⁸ Rasio Elektrifikasi NTT sebesar 59%. Bahan Laporan Kunjungan Kementerian PPN/Bappenas ke Pulau Sumba.

